

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan sikap masyarakat, disamping tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro dan Smith, 2006).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan output perkapita

dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan (Roridkk., 2016)

Pada umumnya para ekonom memberikan pengertian yang sama untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Para ekonom mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP). Dalam arti yang luas, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan di negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping itu juga memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial (Febdianti, 2017)

Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagaimana tujuan dari pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil (Indasari, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai suatu indikator yang mempunyai peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah dimasa yang akan datang. Kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumber daya alam yang berbeda menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah lainnya (Sari, 2018)

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah dalam mensukseskan perekonomian daerahnya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Sebagai upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan otonomi daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing provinsi di Indonesia termasuk provinsi NTB harus mampu menghadapi tantangan

prekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mengatasi pembangunan yang terjadi terutama dalam era reformasi dimana masing-masing daerah memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di tiap-tiap daerah.

Berikut dibawah ini pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi di Indonesia enam tahun terakhir menurut PDRB harga konstan, tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi di Indonesia

Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.73	3.31
Sumatra Utara	6.66	6.45	6.07	5.23	5.1	5.18
Sumatra Barat	6.34	6.31	6.08	5.88	5.52	5.26
Riau	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23
Jambi	7.86	7.03	6.84	7.36	4.2	4.37
Sumatra Selatan	6.36	6.83	5.31	4.79	4.42	5.03
Bengkulu	6.85	6.83	6.07	5.48	5.13	5.3
Lampung	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.15
KEP. Banka Belitung	6.9	5.5	5.2	4.67	4.08	4.11
KEP. Riau	6.96	7.63	7.21	6.6	6.01	5.03
DKI Jakarta	6.73	6.53	6.07	5.91	5.89	5.85
Jawa Barat	6.5	6.5	6.33	5.09	5.04	5.67
Jawa Tengah	5.3	5.34	5.11	5.27	5.47	5.28
DI Yogyakarta	5.21	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05
Jawa Timur	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.55
Banten	7.03	6.83	6.67	5.51	5.4	5.26
Bali	6.66	6.96	6.69	6.73	6.03	6.24

Nusa Tenggara Barat	-3.91	-1.54	5.16	5.17	21.77	5.82
Nusa Tenggara Timur	5.67	5.46	5.41	5.05	5.03	5.18
Kalimantan Barat	5.5	5.91	6.05	5.03	4.86	5.22
Kalimantan Tengah	7.01	6.87	7.37	6.21	7.01	6.36
Kalimantan Selatan	6.97	5.97	5.33	4.84	3.83	4.38
Kalimantan Timur	6.47	5.48	2.76	1.71	-1.21	-0.38
Kalimantan Utara	-	-	-	8.18	3.4	3.75
Sulawesi Utara	6.17	6.86	6.38	6.31	6.12	6.17
Sulawesi Tengah	9.82	9.53	9.59	5.07	15.52	9.98
Sulawesi Selatan	8.13	8.87	7.62	7.54	7.17	7.41
Sulawesi Tenggara	10.63	11.65	7.5	6.26	6.88	6.51
Gorontalo	7.71	7.91	7.67	7.27	6.22	6.52
Sulawesi Barat	10.73	9.25	6.93	8.86	7.39	6.03
Maluku	6.34	7.16	5.24	6.64	5.48	5.76
Maluku Utara	6.8	6.98	6.36	5.49	6.1	5.77
Papua Barat	3.64	3.63	7.36	5.38	4.15	4.52
Papua	-4.28	1.72	8.55	3.65	7.47	9.21

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2017)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB setiap provinsi di Indonesia dalam enam tahun terakhir. Dilihat dari tahun terakhir yaitu tahun 2016 pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi terendah adalah tahun 2015 provinsi Riau yaitu 1.55. Sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi terendah adalah provinsi Riau yaitu 0.22 persen dan pada tahun yang sama yaitu 2015 pertumbuhan tertinggi adalah provinsi NTB yaitu 21.77 persen, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia dalam enam tahun terakhir.

Provinsi NTB merupakan provinsi yang terdiri dari dua pulau yang masing-masing pulau memiliki keunggulannya masing-masing. Seperti dipulau Sumbawa sektor yang unggul dipulau ini adalah sektor pertambangan sedangkan dipulau Lombok adalah sektor jasa-jasa seperti pariwisata (Badan Pusat Statistik,

2017). Walaupun ditahun terahir pertumbuhan PDRB di provinsi NTB tergolong baik akan tetapi di tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan PDRB NTB tumbuh dibawah 1 persen yaitu di tahun 2011 tumbuh sebesar -3.91 persen dan tahun 2012 tumbuh sebesar -1.54 persen, dan merupakan pertumbuhan PDRB yang terendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Di tahun 2015, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan oleh sektor penggalian dan pertambangan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 21.77 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Berikut dibawah ini beberapa sektor yang mendorong pertumbuhan PDRB di provinsi NTB bisa dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.04	4.56	3.29	4.46	6.91	1.96
Pertambangan dan Penggalian	-28.15	-26.65	4.32	-0.14	107.03	6.49
Industri Pengolahan	2.06	4.21	3.65	3.37	3.12	5.32
Pengadaan Listrik dan Gas	10.01	12.12	10.92	39.65	0.89	11.25
Peng. Air dan Peng. Sampah	6.14	3.53	4.4	7.16	3.79	4.89
Konstruksi	7.43	3.69	5.19	7.8	7.27	8.64
P. Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor dan Mobil	7.37	9.53	7.86	7.67	5.43	7.66
Transportasi dan Pergudangan	6.94	6.56	5.22	7.48	6.75	6.58
P. Akomodasi dan Makan Minum	7.73	7.37	8.64	6.92	5.65	10.44
Informasi dan Komunikasi	10.24	8.39	7.39	8.37	8.34	8.79

Jasa Keuangan dan Asuransi	14.22	13.31	9.21	7.72	9.32	12.32
Real Estate	6.94	6.68	7.84	5.74	6.83	6.18
Jasa Perusahaan	7.13	9.31	6.92	7.26	5.76	6.99
A. Pem. Per. dan Jam. Sosial Wajib	1.14	0.86	3.03	4.98	3.69	2.69
Jasa Pendidikan	7.69	4.05	6.03	6.72	7.27	5.38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.65	3.71	7.57	6.92	6.77	5.7
Jasa Lainnya	8.03	2.3	8.04	7.83	6.21	6.29
PDRB	-3.91	-1.54	5.16	5.17	21.77	5.82

Sumber : Badan Pusat Statistik NTB (2017)

Data tabel 1.2 diatas menunjukkan jika memperhatikan kinerja masing masing lapangan usaha selain sektor penggalian dan pertambangan, sektor lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan PDRB provinsi NTB. Menurut Bank Indonesia (2018), posisi pinjaman mengalami peningkatan sebesar 13.90 persen pada tahun 2016 sehingga prekonomian rill masyarakat ikut meningkat secara perlahan-lahan.

Selanjutnya peningkatan terjadi dilapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu tahun 2016 sebesar 11.25 persen, dimana ditahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0.89 persen. Penurunan juga terjadi sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang sebelumnya di tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 107.03 persen dan turun drastis ditahun 2016 sebesar 6.49 persen. Penurunan ini juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB yang sebelumnya ditahun 2015 pertumbuhan ekonomi NTB tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia yaitu sebesar 21.77 persen dan turun ditahun 2016 sebesar 5.82 persen. Penurunan ini terjadi, seiring dengan penurunan disektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Menurut Badan Pusat Statistik provinsi NTB (2018), perekonomian di NTB sangat bergantung pada sektor pertambangan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tercatat paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Tingginya pertumbuhan NTB di tahun 2015 disebabkan oleh faktor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, perusahaan tambang yang tengah beroperasi di NTB yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (Badan Pusat Statistik, 2018)

Beberapa kabupaten atau kota di provinsi NTB yang memiliki sektor yang diunggulkan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB di provinsi NTB seperti kabupaten Lombok Barat unggul di hampir seluruh sektor, kecuali sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sektor unggulan yang tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, tercermin dari berkembangnya sektor pariwisata di daerah tersebut. Selanjutnya adalah kabupaten Lombok Tengah sektor yang tertinggi adalah sektor penggunaan dan sektor jasa-jasa (faktor jasa ini adalah jasa tenaga kerja keluar negeri) bahkan provinsi NTB merupakan penyumbang ketiga TKI diseluruh provinsi di Indonesia sehingga sektor ini lebih unggul dibanding dengan sektor lainnya.

Kabupaten lain yang mendorong pertumbuhan PDRB provinsi NTB adalah kabupaten Lombok Timur, yaitu faktor industri pengolahan dan jasa-jasa merupakan sektor unggulan yang dominan selain empat sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, perdagangan, listrik, gas dan air bersih. Sektor lainnya adalah bangunan dan jasa perusahaan. Sedangkan di kabupaten Sumbawa faktor

pendorong PDRB adalah tiga sektor yaitu; listrik, gas dan air bersih sektor-sektor ini merupakan yang paling unggul di kabupaten Sumbawa. Sementara di sektor pertanian kabupaten Dompu merupakan sektor andalan diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Kabupaten Bima sektor yang unggul sama seperti kabupaten Dompu yaitu sektor pertanian diikuti oleh sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selanjutnya dalah kota Bima meskipun merupakan kota termuda di NTB kota ini mempunyai tujuh sektor unggulan yaitu; listrik, gas dan jasa-jasa. Dua sektorlainnya adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kota lain yang mendorong PDRB provisi NTB adalah kota Mataram yang memiliki sektor unggulan seperti sektor pengangkutan dan komunikasi. Selanjutnya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Meskipun beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB mempunyai sektorunggulan masing-masing untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB provinsi NTB, namun hingga saat ini provinsi NTB masih dihadapkan pada permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain, seperti pulau Bali maupun Indonesia, pertumbuhan PDRB enam tahun terahir di provinsi NTB masih tergolong rendah. Selain faktor sektor pertambangan dan penggalian pertumbuhan PDRB provinsi NTB juga di pengaruhi oleh sektor pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi.

Dari beberapa sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sektor penggalian dan pertambangan, sektor lapangan usaha jasa keuangan asuransi, jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Dari sektor-sektor tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit, angkatan kerja, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB provinsi NTB.

Perkembangan kredit dapat dilihat ditabel 1.2 yaitu sektor keuangan dan asuransi yang menunjukkan pertumbuhan yang dari tahun ketahun selalu meningkat sehingga hal ini dapat berdampak terhadap pertumbuhan PDRB. Selain perkembangan kredit faktor lain yang mendorong PDRB provinsi NTB adalah angkatan kerja. Perkembangan angkatan kerja di provinsi NTB dapat dilihat dari sektor jasa-jasa seperti Jasa Perusahaan, jasa pendidikan dan jasa lainnya, dari data tabel 1.2 dan masing-masing sektor unggulan yang ada di setiap kabupaten/kota menunjukkan sektor jasa berpengaruh terhadap PDRB provinsi NTB. Sedangkan perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat di semua sektor termasuk pertambangan dan penggalian karena dapat menghasilkan ekspor yang akan masuk kedalam anggaran pendapatan daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti Sari (2018), Hedry, (2010), Permada (2014) dan Ambiyah (2017), dengan menggunakan beberapa variabel seperti berikut: variabel angkatan kerja, penanaman modal dalam negeri,

penanaman modal asing, pendapatan asli daerah, tabungan, posisi kredit, jumlah penduduk dan belanja modal. Kemudian Yozi dkk. (2015), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dengan menggunakan variabel tabungan, posisi kredit, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012.

Dari beberapa sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di provinsi NTB diatas dan penelitian terdahulu banyak yang mengungkapkan faktor-faktor pendorong PDRB seperti penyaluran kredit, angkatan kerja, pendapatan asli daerah, dan belanja modal. Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap PDRB, sehingga didalam penelitian ini peneliti juga menggunakan variabel yang sama dalam melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB melalui penelitian ***“Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016”***.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu;

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredit untuk modal kerja, angkatan kerja, belanja modal, dan pendapatan asli daerah,
3. Objek penelitian ini adalah sepuluh kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yaitu kabupaten Lombok Barat, kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Timur, kabupaten Sumbawa, kabupaten Dompu, kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, kabupaten Lombok Utara, kota Mataram dan kota Bima.
4. Data yang digunakan yaitu tahun 2011-2016.

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan permasalahan diatas maka ada beberapa hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana pengaruh posisi kredit untuk modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkabupaten/kota di provinsi NTB?
2. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkabupaten/kota di provinsi NTB?

3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkabupaten/kota di provinsi NTB?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkabupaten/kota di provinsi NTB?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh posisi kredit untuk modal kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat kebijakan yang tepat, khususnya untuk pemerintah di provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk dapat mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB dan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperbanyak sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB.